

ANALISIS FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INKLUSI KEUANGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2013 – 2018

Ninda Puspasari

Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email : nindapsari36@gmail.com

Abstrak: *This research aims to analyze the factors that influence financial inclusion in the Special Region of Yogyakarta. Financial inclusion is one of the easy ways to access finance, banking services, as well as being an alternative in overcoming financial problems and solving the economy in society. The financial inclusion level of each region will be calculated using the index of financial inclusion. The factor that affecting of financial inclusion include GDP per capita, Literacy rate, Paved Road, and Unemployment. The method used is a panel data with a cross section of 5 districts / cities in Yogyakarta Special Region and the analysis year 2013-2018. The results showed that the level of financial inclusion in the Special Region of Yogyakarta is classified as middle, indicated by the value of financial inclusion index 0.26. GDP per capita and Paved Road are positive and significant on Financial inclusion in the Special Region of Yogyakarta. Literacy rates indicate a negative and insignificant on Financial inclusion in the Special Region of Yogyakarta. Unemployment are Positive and insignificant on Financial inclusion in the Special Region of Yogyakarta.*

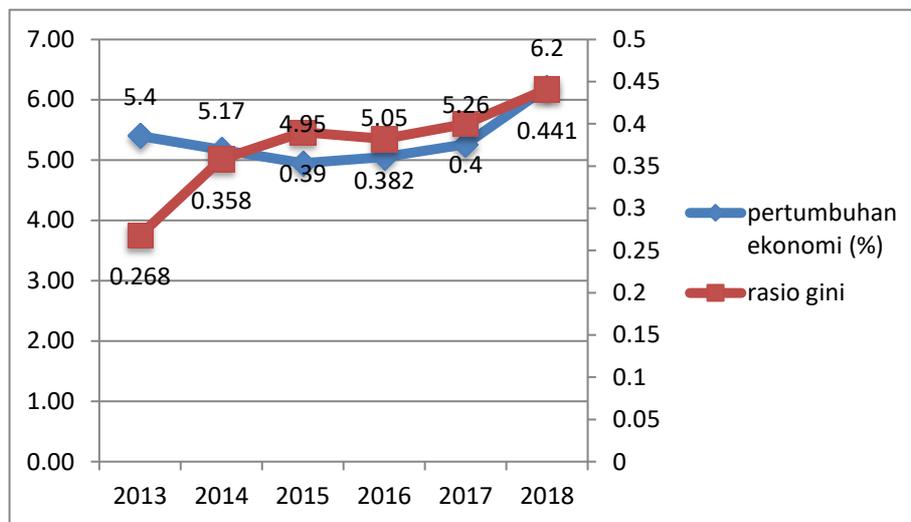
Keywords: *Financial Inclusion, GDP Per Capita, Literacy rate, Paved Road, Unemployment,*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Keuangan inklusif merupakan salah satu cara dalam mempermudah akses keuangan, layanan perbankan, serta menjadi alternatif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di masyarakat. Tingkat keuangan inklusif masing-masing wilayah akan dihitung menggunakan Indeks Keuangan Inklusif. Faktor yang digunakan dalam mempengaruhi keuangan inklusif antara lain PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, Jalan Aspal, dan pengangguran. Metode yang digunakan adalah data panel dengan *cross section* 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan tahun analisis 2013-2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai keuangan inklusif sebesar 0,26. PDRB Per Kapita dan Jalan Aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka melek Huruf menunjukkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangguran berpengaruh Positif dan tidak signifikan terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: Keuangan Inklusif, PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, Jalan Aspal, Pengangguran.

PENDAHULUAN

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu, setiap daerah menetapkan target yang tinggi dalam perencanaan dan tujuan infrastruktur daerahnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 – 2018. Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami peningkatan pertumbuhan ekonominya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019

GAMBAR 1

Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini di Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2013-2018

Walaupun pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan, namun ini bisa saja menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Dalam melihat kesenjangan pendapatan disuatu wilayah, maka kita melihat dari indeks gini rasionya. Rasio gini adalah salah satu alat untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan. Pada gambar 1 menunjukkan Rasio gini di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2013-2018 berfluktuasi cenderung meningkat. Dari kondisi ini menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ekonomi masih rendah perlu ada perhatian lebih terhadap proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya di bidang ekonomi

Menurut Sanjaya (2014) salah satu yang menjadi penyebab rendahnya kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah adalah tingkat literasi keuangan. Menurut OJK, secara nasional Tingkat Literasi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih dikategorikan rendah dibandingkan dengan tingkat penggunaan produknya secara nasional. Salah satu faktor penyebab rendahnya literasi keuangan adalah kondisi geografis dan mayoritas masyarakatnya berada didaerah pedesaan sehingga menghambat akses terhadap layanan jasa keuangan terutama di sektor perbankan. Semakin terbukanya akses jasa keuangan maka masyarakat diharapkan mampu memanfaatkannya serta meningkatkan pendapatannya melalui penyaluran kredit oleh lembaga keuangan untuk kegiatan produktif. Sulitnya akses terhadap jasa keuangan akan menyebabkan masyarakat mengandalkan tabungan yang terbatas untuk investasi dan pengusaha kecil harus mengandalkan laba untuk meneruskan usahanya. Akibatnya akan menambah ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi akan jalan melambat. Untuk mengatasi keterbatasan akses layanan perbankan ini , maka muncul suatu program perluasan akses layanan keuangan yang disebut dengan keuangan inklusi. Menurut Sarma (2011), inklusi keuangan adalah proses yang menjamin kemudahan akses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal untuk semua anggota ekonomi. Inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional terutama Indonesia. Pada bulan Juli 2012, Bank Indonesia bekerjasama dengan Sekretariat Wakil Presiden-Tim Nasional Pencapaian Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan mengeluarkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Salah satu tujuan dari strategi ini adalah menjadikan strategi nasional keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusi dapat memeberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih besar bagi setiap penduduknya terutama kelompok miskin dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan keuangan.

Strategi keuangan inklusif muncul karena rendahnya akses keuangan oleh masyarakat yang disebabkan dari tingkat pendapatan yang rendah, pengetahuan masyarakat akan

keuangan dan perbankan masih kurang. Biaya administrasi yang dianggap masih tinggi serta jauhnya jangkauan bank dari pemukiman masyarakat. Pentingnya sebuah sistem keuangan yang inklusif secara luas diakui dalam lingkaran kebijakan dan inklusi keuangan dipandang sebagai prioritas kebijakan di banyak negara.

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kegiatan keuangan inklusif diperlukan suatu ukuran kinerja. Sarma (2012) mengembangkan alat ukur untuk mengukur tingkat inklusi keuangan suatu wilayah dengan merumuskan indeks inklusi keuangan. Dimana perumusan indeks ini dibagi menjadi 3 dimensi atau indikator yaitu dimensi penetrasi perbankan, ketersediaan jasa perbankan, penggunaan jasa perbankan.

Indeks pengukuran inklusi keuangan dapat menjelaskan bahwa semakin tinggi indeks inklusi keuangan suatu wilayah berhubungan terhadap pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Indeks inklusi keuangan dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui perkembangan kegiatan keuangan disuatu wilayah dan menunjukkan sejauh mana strategi nasional keuangan inklusif yaitu pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Keberhasilan pelaksanaan keuangan inklusif dapat tercapai jika masyarakat di semua wilayah di Indonesia memiliki akses keuangan yang sama dan merata.

Dalam islam, pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan dipandang penting karena dengan terdapatnya keadilan dalam distribusi maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fauzia dan Riyadi (2014) menjelaskan bahwa distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar islam yaitu menyejahterakan pemeluknya baik didunia maupun di akhirat. Ini bisa terjadi jika kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan terealisasi dengan baik dan merata. Sehingga tidak ada kesejangan atau ketimpangan ekonomi antara si kaya dan si miskin. Allah mengancam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi pada orang tertentu saja. Ini tertuang dalam dalam Al-Hasyr ayat 7 yang menjelaskan bahwa ketimpangan ekonomi dilarang oleh Allah SWT.

Pada hasil penelitian Sanjaya (2015) menunjukkan inklusi keuangan di Indonesia dikategorikan rendah. Ini berkaitan dengan penelitian Ummah (2015) yang mana rata-rata indeks keuangan inklusi antar provinsi di Indonesia berkisar antara 0,1-0,33 kecuali provinsi DKI Jakarta yang tergolong tinggi mencapai 0,8. Menurut penelitian Atikah (2016), Hampir seluruh daerah kabupatena/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tingkat keuangan inklusi rendah. Untuk daerah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar 0,05-0,1 kecuali untuk kota Yogyakarta yang tergolong tinggi karena mencapai 0,693 karena disebabkan kota Yogyakarta merupakan ibukota provinsi dan pusat kegiatan perekonomian dan pembelajaran. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta masih kurangnya partisipasi masyarakat didalamnya terhadap jasa keuangan. Hal ini dapat terlihat dari tiga sisi yaitu aksesabilitas, ketersediaan, dan penggunaan. Dilihat dari kondisi ini, menunjukkan bahwasanya masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan inklusi keuangan. Inklusi keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian Sarma dan Pais (2011) mengatakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keuangan inklusif di negara dapat disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi dan infrastruktur. Beberapa faktor pada keadaan sosial-ekonomi antara lain pendapatan per kapita, angka melek huruf, populasi desa dan pengangguran. Sementara itu yang termasuk dalam kategori infrastruktur adalah jaringan jalan aspal, jumlah pengguna internet, dan jumlah pengguna telepon.

PDRB per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. PDRB Per kapita dianggap penting karena semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kesempatan mengakses jasa keuangan. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis apa harus mengerti apa yang dibaca atau ditulisnya.. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan penduduk untuk memperoleh informasi melalui kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari. jalan aspal merupakan salah satu infrastruktur yang mengindikasikan kondisi pembangunan

yang baik dalam suatu negara. Selain itu, semakin baik kondisi jalan yang ada pada suatu wilayah akan memudahkan akses pada lembaga keuangan. peningkatan lapangan kerja baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akan sedikit kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan (Lenka dan Barik, 2018)

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui tingkat inklusi keuangan, mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita, angka melek huruf, infrastruktur jalan aspal, dan pengangguran terhadap Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini berupa analisis kuantitatif yang menggunakan data sekunder berupa data panel atau data *time series* dan data *cross section* dengan periode tahunan dimulai dari tahun 2013-2018 dengan lima kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo, Bantul, Kota Yogyakarta. Objek penelitian yang digunakan adalah jumlah layanan jasa keuangan, jumlah rekening deposit, serta proporsi kredit dan tabungan yang ada di bank umum di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan variabel tersebut digunakan untuk menghitung tingkat keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif, peneliti menggunakan variabel PDRB Per Kapita, Angka Melek Huruf, Infrastruktur Jalan Aspal, dan Pengangguran, yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data adalah library research dengan sumber data utama dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan Otoritas Jasa Keuangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta Untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini uji kualitas data menggunakan uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas.

TABEL 1.

Hasil Uji Multikolinieritas

	GDP Per kapita	Angka Melek Huruf	Jalan Aspal	Pengangguran
GDP Per kapita	1	-0.3862	-0.2498	0.6323
Angka Melek Huruf	0.7524	1	0.1981	0.4953
Jalan Aspal	-0.3190	0.1981	1	-0.3087
Pengangguran	0.6323	0.4953	-0.3087	1

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada table 1. diatas, disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas. Dimana nilai koefisien korelasi variabel independen berada dibawah 0,85, sehingga model ini tidak terdapat multikolinieritas.

TABEL 2.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
C	0.2140
PDRB	0.4356
Angka Melek Huruf	0.3226
Jalan Aspal	0.0999
Pengangguran	0.1644

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$, oleh karena itu data regresi penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB, angka melek huruf, jalan aspal, dan pengangguran sebagai variabel independen terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Hasil Penelitian

Pemilihan model yang digunakan dalam penelitian dilakukan berdasarkan pertimbangan statistic. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dugaan yang tepat dan efisien.

Berikut hasil pemilihan model :

Uji Chow

Uji chow merupakan uji yang dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara *fixed effect* dengan *common effect*.

TABEL 3.

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	409.348704	(4,21)	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2020

Berdasarkan hasil uji chow pada table 3 diatas didapatkan bahwa nilai probabilitas *cross-section F* sebesar 0,0000 yang nilainya kurang dari 0,05 sehingga menolak hipotesis nol. Dapat diartikan bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan dalam hasil analisis ini daripada model *common effect*.

Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan metode apa yang paling tepat antara metode *fixed effect* atau *random effect*.

TABEL 4.

Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross section random	381.080277	4	0.0000

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *cross-section random* adalah 0.0000 yang lebih kecil dari 0,05. Sehingga menolak hipotesis nol yang artinya bahwa model *fixed effect* lebih tepat digunakan daripada model *random effect*.

Hasil Estimasi Model Regresi Panel

Setelah pengujian statistik untuk menentukan model mana yang akan dipilih dalam penelitian ini, maka disimpulkan bahwa model fixed effect yang akan digunakan. Berikut disajikan tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten/kota dalam periode 2013 – 2018.

TABEL 5.

Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen : Indeks Keuangan Inklusif	Model Fixed Effect
Konstanta	-1.419136
Standar error	0.217820
t-statistik	-6.515191
Probabilitas	0.0000
PDRB perKapita	0.137701
Standar error	0.029667
T-statistic	4.641578
Probabilitas	0.0001
Angka Melek Huruf	-0.000962
Standar error	0.001443
T-statistic	-0.666757
Probabilitas	0.5122
Jalan Aspal	0.069623
Standar error	0.018969
T-statistic	3.670420
Probabilitas	0.0014
Pengangguran	0.002284
Standar error	0.003260
T-statistic	0.700365
Probabilitas	0.4914
R²	0.995979
F-Statistic	650.2267
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	2.168727

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari hasil diatas dapat diketahui pengaruh dari variabel *cross-section* ini menentukan besarnya pengaruh atau efek wilayah terhadap indeks keuangan inklusi. Jika diurutkan dari wilayah yang memberikan kontribusi paling besar adalah Kabupaten Gunungkidul dengan memberikan efek sebesar 0.388046. Sedangkan wilayah yang memberikan kontribusi paling kecil adalah Kabupaten Kulon Progo memberikan efek sebesar -0.216528 indeks keuangan inklusif.

Uji Statistik

Dari tabel 5. diatas dapat diketahui koefisien regresi untuk variabel PDRB perKapita memiliki koefisien regresi sebesar 0.137701 dengan probabilitas sebesar 0,0001 yang signifikan pada taraf 5 persen. Variabel PDRB berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuangan inklusi Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta .Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf memiliki koefisien regresi negatif sebesar -0.000962 dengan nilai probabilitas sebesar 0,5122 yang tidak signifikan pada taraf 5 persen. Hal ini menyatakan bahwa angka melek huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istmewa Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jalan aspal memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.069623 dengan nilai probabilitas sebesar 0.0014 yang signifikan pada taraf 5 persen. Variabel jalan aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istmewa Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki koefisien regresi positif sebesar 0.002284 dengan nilai probabilitas sebesar 0.4914 yang tidak signifikan pada taraf 5 persen Hal ini menyatakan bahwa Pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di kabupaten Daerah Istmewa Yogyakarta.

Hasil uji F-statistik menunjukkan nilai probabilitas F-statistik adalah sebesar 0,000000. Hal ini berarti bahwa variabel independen PDRB Perkapita, Angka Melek Huruf,

Jalan Aspal, Pengangguran secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Inklusi Keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta).

Dari hasil pengujian didapatkan nilai R^2 sebesar 0.995979. Hal ini berarti perubahan keuangan inklusif di Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 99,59 persen dipengaruhi oleh PDRB, angka melek huruf, jalan aspal, dan pengangguran, sedangkan sisanya sebesar 0,41 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

Pembahasan

Tingkat Keuangan Inklusif

Indeks keuangan inklusif dihitung dengan menggunakan 3 dimensi yaitu dimensi penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan, dan dimensi penggunaan jasa perbankan. Tabel dibawah menunjukkan nilai setiap dimensi yang dicapai oleh Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengadopsi dari penelitian Sarma (2012), dalam penelitian ini, masing-masing dimensi dibagi kedalam 3 kategori, yaitu tinggi ($0,6 < di \leq 1$), sedang ($0,3 \leq di \leq 0,6$), dan rendah ($< 0,3$).

TABEL 6.

Nilai Dimensi Indeks Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2018

Tahun	Dimensi Keuangan Inklusif		
	Penetrasi Perbankan	Ketersediaan Jasa Perbankan	Kegunaan
2013	0.2778	0.2282	0.2573
2014	0.1475	0.2267	0.2808
2015	0.1646	0.2206	0.2900
2016	0.1686	0.2219	0.3123
2017	0.1797	0.2191	0.3347
2018	0.1859	0.2139	0.3549

Sumber : Data Diolah, 2020

Ketiga dimensi menunjukkan dalam kategori sedang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa dimensi penetrasi jasa perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta paling rendah jika dibandingkan dengan dimensi penggunaan jasa perbankan dan dimensi ketersediaan jasa perbankan, yaitu dengan rata-rata sebesar 0,1873 Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki rekening perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta masih rendah.

Dimensi pertama dari perhitungan indeks keuangan inklusif adalah dimensi penetrasi perbankan yang mencerminkan banyaknya penggunaan jasa perbankan. Penetrasi perbankan akan semakin baik apabila pengguna jasa keuangan semakin banyak. Salah satu tolok ukur untuk dimensi penetrasi perbankan adalah jumlah rekening deposit yang ada dalam perbankan. Dimensi kedua dalam perhitungan indeks keuangan inklusif adalah dimensi ketersediaan jasa perbankan. Keberadaan jasa perbankan merupakan hal yang penting dalam keuangan inklusif. Indikator yang digunakan dalam dimensi ketersediaan jasa perbankan adalah jumlah kantor cabang bank.

Jumlah kantor cabang suatu wilayah berhubungan dengan jumlah pemakai jasa perbankan. Namun banyaknya kantor cabang belum cukup menggambarkan luas persebaran layanan perbankan. Oleh karena itu untuk mengetahui berapa banyak individu yang dapat menjangkau perbankan, jumlah kantor cabang yang ada dibagi dengan jumlah populasi dewasa negara tersebut. Dimensi yang ketiga dari keuangan inklusif adalah penggunaan jasa perbankan. Banyak orang yang memiliki akses ke dalam perbankan tetapi tidak menggunakan jasa tersebut karena berbagai alasan seperti jarak yang jauh dari tempat tinggal, produk yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, atau memiliki pengalaman yang buruk dengan penyedia jasa keuangan. Indikator yang digunakan dalam penghitungan dimensi ini adalah jumlah tabungan dan kredit yang disalurkan perbankan.

Berdasarkan nilai rata-rata indeks keuangan inklusif empat Kabupaten dan satu kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah. Tiga Kabupaten yang masih tergolong rendah, yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kulon Progo dengan nilai rata rata keuangan

inklusif mencapai 0,07, 0,12, dan 0,09. Rendahnya indeks keuangan inklusif menunjukkan penyebaran dan pemanfaatan jasa perbankan yang masih rendah. Perbedaan indeks keuangan inklusif antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewaa Yogyakarta menunjukkan masih terjadinya ketimpangan pada akses jasa perbankan antar wilayah.

TABEL 7.

Indeks Keuangan Inklusi berdasarkan Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013-2018

Tahun	Bantul	Sleman	Gunungkidul	Kulon Progo	Kota Yogyakarta
2013	0.0703	0.1274	0.3056	0.0803	0.6910
2014	0.0610	0.1116	0.3316	0.0720	0.5598
2015	0.0668	0.1224	0.3326	0.0810	0.5678
2016	0.0754	0.1281	0.3412	0.0964	0.5777
2017	0.0804	0.1330	0.3665	0.1048	0.5841
2018	0.0852	0.1406	0.3911	0.1057	0.5805

Sumber : Data Diolah, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa Nilai indeks keuangan inklusif tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Untuk kategori sedang adalah Kab. Gunungkidul. Hal ini terjadi karena Kota Yogyakarta unggul dalam dimensi pembentuk indeks inklusi keuangan inklusif. Tingginya indeks keuangan inklusif di Kota Yogyakarta juga menunjukkan terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Kab. Bantul termasuk dalam kategori paling rendah. Rendahnya indeks inklusi keuangan negara tersebut menunjukkan askes terhadap jasa keuangan masih sulit.

Salah satu cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat adalah meningkatkan layanan akses perbankan. Semakin mudah akses keuangan akan memberikan dampak kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup. Semakin banyak masyarakat yang ikut andil dalam menggerakkan roda perekonomian dan memperbesar peluang negara meningkatkan pendapatan, dengan begitu pengentasan kemiskinan bisa tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan Inklusif

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, variabel PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian Park dan Mercado (2015) dan Chithra dan Selvam (2013) yang dilakukan oleh yang menyatakan bahwa PDRB berpengaruh terhadap keuangan inklusif.

Pendapatan dapat menjelaskan kondisi keuangan inklusif suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita dari suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat keuangan inklusifnya. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tren PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga mengakibatkan keuangan inklusif yang mengalami peningkatan. Tingginya pendapatan per kapita suatu negara menjadi tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan kinerja perekonomian membaik. Kondisi perkonomomian yang semakin baik menjadi tanda bagi perbangkan untuk memperluas jaringan sehingga akses ke perbankan akan semakin terbuka. Selain itu, peningkatan PDRB juga menggambarkan peningkatan pada produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam aktivitas perekonomian, akan semakin besar pula peluang masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan semakin besar, baik digunakan untuk menabung, investasi, ataupun keperluan taransaksi lainnya.

Berdasarkan penelitian diatas, variabel Angka Melek Huruf berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sesuai dengan penelitian Ummah dkk. (2015) yang menyatakan angka melek huruf tidak berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusi. Hasil penelitian ini menandakan bahwa angka melek huruf yang tinggi tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif. Hal ini bisa dikerenakan masyarakat yang bisa membaca dan menulis (melek huruf) memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Sanjaya (2014) menyebutkan bahwa pendidikan berperan penting tidak hanya dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam perbaikan kesenjangan sosial. Pendidikan yang lebih baik akan meningkatkan keadilan sosial dan pertumbuhan

ekonomi. Pendidikan juga berperan dalam pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan individu untuk mengakses perbankan tidak serta merta ditentukan oleh kemampuan membaca menulis, namun lebih kepada keinginan individu terkait untuk ikut andil dalam lembaga keuangan.

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Jalan Aspal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sarma dan Pias (2011) dan Chithra dan Selvam (2013) yang menyatakan bahwa rasio panjang jalan berpengaruh terhadap keuangan inklusif. Akses ke layanan keuangan perbankan memerlukan infrastruktur dasar yang ada. Jalan aspal dapat dijadikan sebagai infrastruktur fisik yang umum di suatu daerah. Jalan merupakan salah satu prasarana transportasi darat yang berperan penting dalam sektor perhubungan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan dalam pendistribusian barang dan mobilitas penduduk. Selain itu, jalan beraspal merupakan persyaratan dasar dalam mendirikan cabang bank dan jaringan ATM di daerah pedesaan dan penduduk yang kurang padat. Dengan demikian semakin baik kondisi jalan suatu daerah akan memudahkan akses masyarakat pada lembaga keuangan. Alasan yang lain adalah karena masih banyak masyarakat yang lebih suka ke kantor cabang dan ATM dibandingkan dengan menggunakan layanan internet. Karena masih banyak masyarakat yang belum menggunakan layanan online.

Berdasarkan penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa variabel Pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil ini sejalan dengan penelitian dan Chithra dan Selvam (2013) yang menyatakan bahwa pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keuangan inklusif. Maknanya semakin rendah tingkat pengangguran maka semakin rendah pula tingkat inklusinya. Menurunnya tingkat pengangguran berarti meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja. Meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja diikuti oleh menurunnya tingkat upah atau penghasilan. Penghasilan yang rendah dan tidak stabil akan membuat

masyarakat memiliki rasa ketidakmampuan dalam mengakses layanan keuangan karena penghasil yang rendah hanya diprioritaskan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saja. Sehingga ada rasa ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan karena dipengaruhi oleh pendapatannya yang rendah dan tidak stabil. Kurangnya minat akan jasa lembaga keuangan menyebabkan kurang meratanya penyebaran lembaga formal keuangan yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan pun menjadi rendah atau menurun. Sehingga penurunan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan.

KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan tentang keuangan inklusif terhadap kemiskinan di ASEAN adalah sebagai berikut :

1. Inklusi keuangan di Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk dalam kategori rendah. Nilai indeks keuangan inklusif tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta. Hal ini terjadi karena Kota Yogyakarta merupakan ibukota dari provinsi dan pusat kegiatan ekonomi dan pembelajaran sehingga terdapat kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses jasa keuangan. Untuk kategori sedang adalah Kab. Gunungkidul. Kab. Bantul termasuk dalam kategori paling rendah. Rendahnya indeks inklusi keuangan wilayah tersebut menunjukkan akses terhadap jasa keuangan masih sulit.
2. PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita dari suatu wilayah maka akan semakin tinggi tingkat keuangan inklusifnya. Tingginya pendapatan per kapita suatu negara menjadi tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang positif akan menunjukkan kinerja perekonomian membaik
3. Angka melek huruf tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini bisa dikarenakan masyarakat yang bisa membaca dan menulis (melek

huruf) memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah dan kemampuan individu untuk mengakses perbankan tidak serta merta ditentukan oleh kemampuan membaca menulis, namun lebih kepada keinginan individu terkait untuk ikut andil dalam lembaga keuangan.

4. Jalan aspal berpengaruh signifikan terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebijakan pengembangan dan pembangunan fisik jalan raya semakin memudahkan kegiatan perekonomian masyarakat di Daerah istimewa Yogyakarta, baik fungsi distribusi barang dan jasa. Maupun mobilitas penduduk serta daya tarik investasi. jalan beraspal merupakan persyaratan dasar dalam mendirikan cabang bank dan jaringan ATM di daerah pedesaan dan penduduk yang kurang padat. Dengan demikian semakin baik kondisi jalan suatu daerah akan memudahkan akses masyarakat pada lembaga keuangan.
5. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penurunan pengangguran maka meningkatkan jumlah pekerja. Meningkatnya tenaga kerja atau jumlah pekerja diikuti oleh menurunnya tingkat upah atau penghasilan. Penghasilan yang rendah dan tidak stabil akan membuat masyarakat memiliki rasa ketidakmampuan dalam mengakses layanan keuangan karena penghasilannya yang rendah hanya diprioritaskan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya saja. Kurangnya minat akan jasa lembaga keuangan menyebabkan kurang meratanya penyebaran lembaga formal keuangan yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan pun menjadi rendah atau menurun.

Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Baik pemerintah di setiap wilayah maupun pelaku sektor perbankan bekerja sama untuk meningkatkan akses dan penggunaan jasa perbankan dengan cara meningkatkan setiap dimensi keuangan inklusif. Penetrasi perbankan dapat ditingkatkan dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Akses perbankan dapat ditingkatkan dengan

mengembangkan *branchless banking*. Sedangkan untuk dimensi kegunaan, baik pemerintah di setiap wilayah maupun *stakeholder* yang terkait dapat menyediakan kredit murah dan mudah diakses oleh pelaku usaha yang membutuhkan modal.

2. Sebagaimana yang tercantum dalam Strategi Nasional Inklusif pada pilar pertama yaitu edukasi keuangan, maka diperlukan peningkatan pemahaman mengenai jasa perbankan dengan melakukan edukasi jasa keuangan terutama bagi masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, perempuan dan penduduk daerah yang tertinggal serta peningkatan infrastruktur fisik agar jasa keuangan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat diberbagai daerah. Seperti yang terjabar dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abel, S., Mutandw, L., and Roux, P. Le. 2018. A Review of Determinants of Financial Inclusion. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(3), 1–8.
- Allen F, Demirguc-Kunt A, Klapper L, Peria MSM. 2012. “The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts”. Development Research Group, Finance and Private Sector Development Team. World Bank : *Working paper* No 6290
- Ali, I., and Son, H. H. 2007. Measuring Inclusive Growth. In *Asian Development Bank* (Vol. 24). <https://doi.org/10.1177/002795011924700110>
- Anggraeni L. 2009. Factor Influencing and Credit Constraints of a Financial Self-Help Group in a Remote Rural Area: The Case of ROSCA and ASCRA in Kemang Village West Java. *Journal of Applied Sciences*. 9(11):2067- 2077.
- Akenbor, C.O., 2015. Financial Inclusion And Poverty Trap In Nigeria. *Mustang Journal Of Accounting And Finance*, Volume 7, Spring, 2015: 149-159.
- Annisa, Y., Arifin, S., dan Setyadi, S. 2019. Faktor – Faktor Penentu Inklusi Keuangan di Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika Journal*, 14(1), 150-170.
- Atikah, dan Ma’ruf, A. 2016. Analisis Keuangan Inklusif: Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 17(1), 31–45. <https://doi.org/10.18196/jesp.17.1.3496>
- Ariyani, F., dan Ma’ruf, A. 2019. Financial Inclusion and Achievements of Sustainable Development Goals (SDGs) in ASEAN. *Journal of Business and Economics Review*, 4(4), 147–155.
- Bank Indonesia. 2013. Kebijakan BI 2013 : Bauran Kebijakan Demi Pertumbuhan Ekonomi Inklusid dan Berkelanjutan. Tersedia pada <http://www.bi.go.id/>. Diakses tanggal 21 November 2019
- Bank Indonesia. 2014. Booklet Keuangan Inklusif Bank Indonesia. Tersedia pada <http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/edukasi/Contents/Buku%20Saku%20Keuangan%20Inklusif.pdf>. Diakses tanggal 21 November 2019

- Bank Indonesia. 2014. Financial Literacy Baseline survey summary, Volume1, September, hal. 1-3.
- Basuki, Agus Tri, 2017, *Ekonometrika Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi (dilengkapi dengan eviews 7)*, Yogyakarta : Danisa Media
- Badan Pusat Statistik, Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka, <https://www.bpsjogja.go.id/>, Diakses tanggal 21 November 2019.
- Chithra, N., and Selvam, M. 2013. Determinants of Financial Inclusion: An Empirical Study on the Inter-State Variations in India. *SSRN Electronic Journal*, 1–15. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2296096>
- David, O. O. K., Oluseyi, A. S., and Emmanuel, A. 2018. Empirical Analysis of the Determinants of Financial Inclusion in Nigeria: 1990-2016. *Journal of Finance and Economics*, 6(1), 19–25. <https://doi.org/10.12691/jfe-6-1-3>
- Demirgüç-Kunt, A., and Klapper, L. 2013. Measuring financial inclusion: Explaining variation in use of financial services across and within countries. In *Brookings Papers on Economic Activity*. <https://doi.org/10.1353/eca.2013.0002>
- Demirguc-Kunt A, Beck T, Honohan P. 2008. *Finance for All? Policies and Pitfalls in Expanding Access*. Washington DC (US): The World Bank group.
- Jannah, Y., dan Kaluge, D. 2019. Analisis Variabel Sosial Ekonomi Terhadap Tingkat Inklusi Keuangan Negara Asia Tahun 2010-2015. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, (Vol 6) , 1-17. <https://doi.org/10.21107/dinar/>
- Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. 2004. UU no.38 tahun 2004 tentang jalan. Tersedia pada <https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/Peraturan-Perundangan/Undang-Undang/undang-undang-nomor-38-tahun-2004-1307>. Diakses tanggal 14 februari 2020
- Khoirunnisa, I. 2013. Analisis Kausalitas Inklusi Keuangan terhadap Pertumbuhan Inklusif di Indonesia. *Tesis*. Sumatera Utara : Universitas Sumatra Utara.
- Le, T. T., Dang, N. D. L., Nguyen, T. D. T., Vu, T. S., and Tran, M. D. 2019. Determinants of Financial Inclusion: Comparative Study of Asian Countries. In *Asian Economic and Financial Review* (Vol. 9). <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2019.910.1107.1123>
- Lenka, S. K., and Barik, R. 2018. Has expansion of mobile phone and internet use spurred financial inclusion in the SAARC countries? *Financial Innovation*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40854-018-0089-x>
- Migap, J. P., Okwanya, I., dan Ojeka, G. 2015. Financial Inclusion for Inclusive Growth : The Nigerian Perspective. *International Journal of Information Technology and Business Management*, 37(1), 1–8.
- Park, C.-Y., & Mercado, R. J. (2015). Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia. *Asian Development Bank*, (426). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2558936>
- Sanjaya, I., dan Nursechafia. 2016. Inklusi Keuangan Dan Pertumbuhan Inklusi : Analisis Antar Provinsi di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*(Vol 18).
- Sarma, M. 2012. Index of Financial Inclusion – A measure of financial sector inclusiveness. In *Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development*.

- Sarma, M., and Pias, J. 2011. Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis. *Journal of International Development* 23. <https://doi.org/10.14707/ajbr.160020>
- Steelyana, E., 2013. Perempuan dan Perbankan: Sebuah Tinjauan Tentang Peran Inklusi Keuangan Terhadap Pengusaha UMKM Perempuan Di Indonesia. *Journal The Winners*, Vol. 14 No. 2, September 2013: 95-103.
- Ummah, B. B., Nuryartono, N., dan Anggraeni, L. 2015. Analisis Inklusi Keuangan Dan Pemerataan Pendapatan Di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan* (Vol. 4). Bogor.
- Ummah, B. B. 2013. Analisis Keuangan Inklusi Dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia. *Tesis*. Bogor : Institut Pertanian Bogor
- World Bank, 2009, *Measuring Access to Financial Services Around the World*. Washington DC (US): The World Bank group.